KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) TENTANG PEMBIAYAAN PENDIDIKAN WAJIB BELAJAR 9 TAHUN DI SDN 08 PADANG BESI KOTA PADANG

PURYANTO , DREIZY GUSTIANDA Y
Universitas Ekasakti
puryantoyan@yahoo.com , rezygustianda27@gmail.com

Abstract: *The government program makes a policy on School Operational Assistance (BOS) which is basically to provide funding for non-operational costs for basic education as an organizer of 9-year compulsory education. SDN 08 Padang Besi, Padang City, one of which received School Operational Assistance (BOS) funds. This research uses descriptive qualitative method, with purposive sampling technique. Collecting data by library method, interview, observation and literature review. This study uses the theory of George C. Edward III because the indicators are in accordance with the research. The formulation of the research problem is how the government's policy in School Operational Assistance (BOS) regarding the financing of 9-year compulsory education at SDN 08 Padang Besi, Padang City, is the obstacle in government policy on School Operational Assistance (BOS) regarding the financing of 9-year compulsory education at SDN 08 Padang Besi, Padang City, how are the efforts made to overcome the obstacles in the government's policy on School Operational Assistance (BOS) regarding the financing of 9-year compulsory education at SDN 08 Padang Besi, Padang City. The results showed that the policy had not been effective, it happened because not all policies were implemented by SDN 08 Padang Besi, Padang City. The lack of resources, both inadequate human resources from experts, both from facilities and infrastructure resources to support the implementation of services, and from elements service communication that has not been maximized and the attitude of the implementer who has not been committed to carrying out their duties. And finally, the need for SDN 08 Padang Besi, Padang City to fix the online service system during the corona virus 19 pandemic. The conclusion is that the policy carried out by SDN 08 Padang Besi Padang City is basically to help underprivileged students in financing 9-year compulsory education so that students those who are less able can receive learning well in the teaching and learning process at SDN 08 Padang Besi, Padang City.*
Keywords: *Policy, School Operational Assistance, Education.*

Abstrak: Program pemerintah membuat kebijakan tentang Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya non operasional bagi pendidikan dasar sebagai penyelenggara wajib belajar 9 tahun. SDN 08 Padang Besi Kota Padang yang salah satunya menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik *purposive sampling.* Pengumpulan data dengan metode perpustakaan, wawancara, observasi dan kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan teori George C. Edward III karena indikator sesuai dengan penelitian. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana kebijakan pemerintah dalam Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang,Apakah kendala dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang**.** Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan belum efektif, hal itu terjadi karena belum semua kebijakan dijalankan oleh SDN 08 Padang Besi Kota Padang.kurangnya sumberdaya baik itu sumberdaya manusia yang belum memadai dari tenaga ahli baik dari sumberdaya sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan pelayanan.dan dari unsur komunikasi pelayanan yang belum maksimal serta pada

sikap pelaksana yang belum komitmen dalam menjalankan tugas. Dan terakhir perluhnya SDN 08 Padang Besi Kota Padang membenahi sistem pelayanan online pada masa pandemi corona virus 19. Kesimpulan adalah kebijakan yang dilakukan oleh pihak SDN 08 Padang Besi Kota padang pada dasarnya untuk membantu siswa yang kurang mampu dalam pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun sehingga siswa yang kurang mampu dapat menerima pembelajaran dengan baik dalam proses belajar mengajar di SDN 08 Padang Besi Kota Padang.
Kata Kunci : Kebijakan, Bantuan Operasional Sekolah, Pendidikan.

A. Pendahuluan

Kontribusi dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan sangat besar terhadap kemajuan suatu daerah maka dengan pendidikan menjadi salah satu perhatian utama bagi pemerintah daerah itu sendiri. Berbagai macam usaha dan upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan semakin berkualitas dari waktu ke waktu dan pendidikan dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat (Muhammad Syahrul. 2018).

Permasalahan pendidikan saat ini adalah terbatasnya akses pendidikan terutama untuk masyarakat miskin. Masih banyak anak-anak didaerah yang masih berusia dini tidak dapat mengenyam pendidikan yang disebabkan oleh beberapa faktor, terutama faktor ekonomi. Keadaan tersebut tentu harus di perbaiki agar hak setiap warga masyarakat yang didaerah untuk mendapatkan pendidikan dapat tepenuhi sekaligus untuk pencapaian sasaran program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Melalui program dana BOS. Oleh karena itu,pemerintah melalui Departemen pendidikan Nasional mencanangkan kebijakan dana BOS tersebut. sebagai pendamping dari program wajib belajar yang dicanangkan pemerintah pusat (Departemen Pendidikan Nasional,2009).

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu, meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (Yuliastanti, 2018).

Berdasarkan observasi yang peneliti temui dilapangan terlihat adanya permasalahan yang terjadi di SDN 08 Padang Besi. Seperti pada penyelenggaraan dana BOS yang tidak luput dari berbagai masalah yaitu perbedaan data yang diinput di Dapodik dengan data riil di sekolah. Keterlambatan penyaluran dana BOS mempengaruhi kinerja guru dan operasional sekolah, karena masih adanya pungutan-pungutan yang dilakukan Oknum pihak sekolah kepada murid yang mengakibatkan beberapa masalah yang terjadi. Sehingga pelaksanaan kebijakan dana BOS itu sendiri tidak berjalan efektif dan efisien (Yulia, 2021).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kebijakan pemerintah terhadap bantuan operasional sekolah tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun dalam bentuk skripsi dengan judul "kebijakan pemerintah terhadap bantuan operasional sekolah tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di sdn 08 padang besi Kota Padang".

B. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitianini ada penelitian *deskriptif* kemudian ditunjang *kualitatif*. Penelitian *deskriptif* yaitu bentuk penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan agar data yang tersedia dan terkumpul dapat memberikan gambaran secermat mungkin tentang keadaan yang terjadi pada objek penelitian. Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subyek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati/diteliti. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi "finit" dan populasi"infinit". Populasi finit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi infinit adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti (Supardi, 1993). Sesuai dengan pemahaman tersebut maka

populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pegawai yang ada bekerja di SDN 08 Padang Besi, keseluruhan pegawai yang ada di komite SDN 08 Padang Besi dan keseluruhan wali murid SDN 08 Padang Besi Kota Padang. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan dalam penelitian. Mengingat jumlah populasi maka seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel tersebut. Dalam pengambilan sampel ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel berdasarkan tujuan tertentu saja artinya berapapun jumlah sampel yang akan ditetapkan nantinya mewakili keseluruhan populasi yang telah disebutkan diatas. Berdasarkan teknik *porposive sampling* akhirnya penulis menetapkan jumlah sampel adalah (Enam) orang yang penulis anggap sudah mewakili jumlah populasi yang telah disebutkan diatas. Dalam penelitian ini diperlukan data yang menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi , dan data tersebut dapat dipercaya kebenarannya, dengan objek yang sesuai dengan kenyataan. Oleh karena itu, kebenarannya perangkat instrumen sangat menentukan dalam pengumpulan data.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kebijakan Pemerintah Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tentang Pembiayaan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang.

Komunikasi. Bentuk komunikasi dan sosialisasi terkait implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi yaitu setiap adanya rencana kegiatan sekolah yang bersangkutan dengan dana BOS Kepala Sekolah akan mengikuti Rapat dan sosialisai tentang Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang. Setelah mengikuti Rapat dan Sosialisasi tersebut maka Kepala Sekolah melanjutkan rapat dengan Kumpulan Kerja Kepala Sekolah (k3s) setelah mendapatkan keputusan atau Anggaran yang akan dibuat maka Kepala Sekolah harus membicarakan dengan Guru-Guru dan Staff/Pegawai yang ada di SDN 08 Padang Besi.serta mengadakan rapat dan sosialisasi dengan tim Pelaksana program BOS yaitu meliputi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara Sekolah, Guru, Staff/Pegawai dan komite sekolah. Sehingga Pengawas Sekolah dan Komite Sekolah tahu apa rencana yang akan dilakukan dalam penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sumber Daya Manusia. Dalam Kesiapan sumber daya manusia sangat penting didalam pengimplementasian bantuan tersebut sehinggan Kepala Tata Usaha ikut serta dalam kebijakan Bantuan Dana BOS dan mengerti tentang seluk beluk pengimplementasian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang akan dilaksanakan di SDN 08 Padang Besi. Sumber daya manusia yang terdapat di SDN 08 Padang Besi Kota Padang yang terlibat dalam bantuan Dana BOS kurang tenaga ahli dalam pelaksanaan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Sikap Pelaksanaan. Kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam sikap pelaksanaan terdapat beberapa hambatan seperti : pelayanan dari sikap pelaksana belum optimal sehingga menyebab permasalahan antara pelaksana dengan penerima penyaluran dana BOS seperti pencairan dana BOS tidak sesuai dengan tanggal yang telah di tetapkan oleh pemerintah sebelumnya dan menyebabkan tertundanya perencanaan yang telah direncanakan untuk penyaluran dana BOS

Struktur Birokrasi. Struktur birokrasi mempengaruhi penyaluran dana BOS tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang dimana pengaruh tersebut meliputi, jika struktur organisasi yang ada di SDN 08 Padang Besi belum sepenuhnya memenuhi Standar Operational Procedur (SOP) maka penyaluran dana BOS akan menyebabkan permasalahan seperti : tidak tepat sasaran atas pembiayaan dana BOS yang dikeluarkan. Maka dari itu struktur organisasi yang ada di SDN 08 Padang Besi harus memenuhi Standar Operational Procedur (SOP).

E-ISSN: 2657-0300
P-ISSN: 2657-0319

2. Kendala Dalam Kebijakan Pemerintahan Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tentang Pembiayaan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang.

Komunikasi. Dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang tidak seutuhnya dikatakan berhasil karena masih ditemukan beberapa kendala menurut informan dan observasi peneliti. Salah satu kendala dalam komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang yaitu : pada saat diadakan rapat tentang penyaluran Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah setelah di selesaikan atau di sepakati bersama tiba-tiba pada kurung waktu yang tidak di tentukan terdapat perubahan yang dimana tidak sesuai dengan Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah awal dan bisa menyebabkan kesalah pahaman kepada guru-guru yang ada di SDN 08 Padang Besi Kota Padang

Sumberdaya Manusia. Permasalahan yang terjadi pada sumberdaya manusia dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitunya permasalahan seperti kekurangnya tenaga ahli yang mengelola penyaluran Bantuan Operasional Sekolah yang mengakibatkan dan BOS tidak tepat sasaran dan tujuannya.

Sikap Pelaksana. Kendala dari sikap pelaksana dapat kita lihat dari pelayanan sikap pelaksana yang belum optimal sehingga menyebabkan permasalahan antara pelaksana dengan penerima penyaluran dana BOS, dari kurang pelayanan tersebut maka menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang seharusnya disalurkan dengan tepat waktu terpaksa ditunda untuk kurang waktu yang tidak ditentukan.

3. Upaya Untuk Mengatasi Kendala Dalam Kebijakan Pemerintah Terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tentang Pembiayaan Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun Di SDN 08 Padang Besi Kota Padang.

Dari hasil wawancara dalam bidang komunikasi. upaya yang dilakukan oleh Pihak pelaksana dengan pihak penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya melakukan informasi terlebih dahulu tanpa menunggu dengan kurung waktu yang lebih lama sehingga Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) bisa di perbaiki dengan tim pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDN 08 Padang Besi Kota Padang sebelum di laporkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pusat selain itu kepala sekolah bisa melanjutkan informasi yang di dapat dari Dinas Pendidikan Kota padang ke guru-guru dan staff/pegawai yang bekerja di SDN 08 Padang Besi Kota Padang.

Dari hasil wawancara dalam bidang sumber daya. Upaya pemecahan masalah yang dilakukan untuk kendala sumberdaya manusia yaitu dengan merekrut tenaga ahli di bidang penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mengadakan sosialisasi kepada tim penerima penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN 08 Padang Besi selain itu tenaga ahli tersebut menjelaskan secara rinci tentang poin poin penting yang berkaitan dengan kebijakan penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dari hasil wawancara dalam bidang sikap pelaksana. Upaya dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang terdapat kendala didalam sikap pelaksanaan antara pelaksana dengan penerima penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) seperti pencairan penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah yang tertunda pencairannya tanpa di beritahukan kepada penerima pelayanan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebaiknya apabila ada keterlambatan dalam pencairan penyaluran dana sikap pelaksana sebaiknya pelaksana memberitahukan kepada penerima untuk mengubah Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) sesuai dengan tanggal pencairan yang telah di tetapkan.

D. Penutup

Kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ada permasalahan yang terletak di aspek komunikasi, sumberdaya manusia, dan sikap pelaksana akan tetapi untuk aspek birokrasi sudah cukup baik dan jelas untuk di laksanakan. Kendala yang terjadi dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang yaitu berupa kendala komunikasi yang terletak kurang nya komunikasi antara pelaksana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan penerima penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam penetapan tanggal pencairan dana tersebut. Kendala sumberdaya terletak pada sumberdaya manusia yang belum cukup pegawai nya di bidang tenaga ahli dan kendala yang terletak pada sumberdaya sarana dan prasana seperti sarana yang belum lengkap untuk melaksanakan program Kepala Sekolah yaitu Sholat Dhuha dan Sholat dzuhur Sedangkan kendala pada sikap pelaksana terletak pada pelayanan yang di berikan pihak pelaksana kepada pihak penyalur dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Dan yang terkhir kendala dari struktur birokrasi dimana tidak ada permasalahan dari struktuk birokrasi karena struktur birokrasi di SDN 08 Padang Besi Kota Padang telah memenuhi SOP yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kendala yang terjadi dalam kebijakan pemerintah terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tentang pembiayaan pendidikan wajib belajar 9 tahun di SDN 08 Padang Besi Kota Padang yaitu dalam bidang komunikasi dibuat sebuah akun media sosial untuk menyebarkan informasi secara keseluruhan tanpa ada yang tertinggal, dalam bidang sumberdaya upaya penyelesaian masalah dilakukan dengan cara melengkapi sarana yang kurang lengkap dan mempergunakan sarana dengan semestinya dan dibagian sumberdaya manusia dengan melakukan sosialisasi untuk tim Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar dapat memberikan cara yang bagus dalam penyaluran dana. di bagian sikap pelaksana dalam dilakukan upaya seperti rapat kerja untuk penyelsain masalah yang terjadi pada aspek komunikasi dan sumberdaya manusia.

Daftar Pustaka

Amos Neloka. 2017. "*Landasan pendidikan dasar pengenalan diri sendiri menuju perubahan hidup*". Depok : Kencana.

Arifin Tahur, 2015, *kebijakan public dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah*, Bandung, Alfabeta.

Deddy Mulyadi, 2016, *studi kebijakan public dan pelayanan public*, Bandung : Alfabeta.

Eko Handoyo. 2012. "*kebijakan public*". Semarang : Widya Karya.

Leo Agustino, 2016. *Dasar-dasar kebijakan public.* Bandung : Alfabeta.

Lexi J. Maleong, 2001. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya

Said Zainal abidin, 2002. Kebijakan public, Jakarta : Salemba Humanika.

Sugiono, 2009. *Metode penelitian administrasi.* Bandung : Alfabeta

Sri Rahayu. 2020. "*penganggaran dana BOS (Perspektif new instutional* seciology*"*. Malang: Peneleh.

Uddin B. Sore dan sobirin, 2017. "kebijakan public". Makasar : CV Sah Media.

Puryanto, Novi Helmidani, 2019, "Implementasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat Dalam Mengembangkan Usaha, Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kecamatan Koto Baru Kabupaten Dharmasraya" Jurnal Ensiklopedia of Journal Vol.1 No.4 Edisi 1 Juli 2019 Web Jurnal Online : http://jurnal.ensiklopediaku.org

Puryanto, Rahmad Rosadi, 2021, "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Kecamatan Padang Laweh Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019" Jurnal Ensiklopedia Social Review Vol.3 No.1 Februari 2021 Web Jurnal Online : http://jurnal.ensiklopediaku.org

Subki Widyatmoko dan Suyatmini.2017. "*pengelolaan dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SDN Kemasan 1 Surakarta* ". Jurnal managemen pendidikan vol. 12, no .2 juli 2017.

Riska Yuliastanti, 2018, "*impelementasi permendiknas no 37 tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana bos tahun anggaran 2011 untuk evisiensi pendidikan eajib belajar 9 tahun di SMP Negri 3 Simeulue Timur kabupaten Simuelue"*, Skripsi adm public Univ. Muhammadiyah Sumatra Utara.